

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya dan agama memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam antropologi, pembahasan tentang religi atau agama hampir tidak pernah terlewatkan sebagai bagian dari topik utamanya. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam ungkapan “agama mencerminkan budaya” dan sebaliknya, “budaya mencerminkan agama”.

Wujud agama sebagai bagian dari budaya dapat kita temukan pada beberapa tokoh antropologi maupun sosiologi. Salah satu dari tokoh tersebut adalah B. Malinowski yang menyebutkan, bahwa unsur-unsur kebudayaan secara umum ada tujuh, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.¹ Bapak sosiologi Islam Ibn Khaldun dalam *Muqoddimah*nya menyebutkan, bahwa hal-hal yang termasuk dalam kebudayaan adalah sistem kerajaan atau pemerintahan (*al-mulk*), kekuasaan (*al-sulthon*), sistem pencaharian (*al-ma'asy*), kerajinan atau industri (*al-sona`i`u*), dan ilmu pengetahuan (*al-`ulum*). Beliau menambahkan, wujud-wujud dalam kebudayaan, yaitu: dinasti (*daulah*), agama (*millah*), masyarakat kota dan desa (*madinah wa hillah*), nilai atau moral (*`izzah*), anomali (*dzillah*), kuantitas dan minus suatu kebudayaan (*kastroh wa qillah*), ilmu pengetahuan dan industri (*`ilmin wa sina`atin*), mata pencaharian dan hilangnya mata pencaharian tersebut atau pengangguran (*kasb wa `ido`ah*), situasi krisis yang mewabah dan menjamur (*ahwalin mutaqolibatin musya`atin*), masyarakat nomaden dan yang sudah menetap atau berbudaya (*badwin wa hadhorin*), dan segala fenomena yang terjadi serta harapan dan cita-cita masyarakat untuk masa kedepannya (*waqi`in wa muntadhorin*). Menurutnya, semua wujud kebudayaan tersebut dijelaskan berdasarkan hukum kausalitasnya (*`ilal wa al-asbab*).² Dengan demikian, hampir

¹ . M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*, Bandung, Eresco, 1995, hlm.13

² . Ibnu Khaldun, *Muqoddimah al-Allamah Ibnu khaldun*, Beirut, Dar al-Fikr, tth, hlm.6-7

semua elemen dalam kehidupan manusia secara individu maupun sosial merupakan bagian dari kajian budaya, termasuk keberagaman atau religi dan bahasa seperti yang disebutkan di atas.

Dalam kajian budaya keberagaman, beberapa element yang terdapat di dalamnya menjadi fokus perhatian, yaitu: keyakinan religi, sikap manusia terhadap hal yang gaib, serta ritus dan upacara religi. Koentjaraningrat sebagai ahli antropologi di Indonesia menambahkan, bahwa terdapat lima komponen religi yang secara terpisah memiliki peranannya sendiri-sendiri, namun, memiliki saling keterkaitan erat dengan yang lainnya. Komponen-komponen itu adalah: 1). Emosi keagamaan; 2). Sistem keyakinan; 3). Sistem ritus dan upacara; 4). Peralatan ritus dan upacara; dan 5). Umat atau pemeluk agama.³

Bahasa secara umum, merupakan objek yang sangat diperhatikan dalam kajian budaya, karena bahasa merupakan pembeda utama atau aspek yang paling menyolok antara budaya yang terdapat pada hewan dan manusia.⁴ Bahasa dalam kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk di dalamnya adalah bahasa dalam bentuk simbol.

Seorang antropolog agama, Clifford Geertz menyebutkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sistem kebudayaan. Agama adalah pedoman dalam menginterpretasi tindakan manusia. Ia juga mengatakan bahwa agama merupakan sistem simbol. Simbol-simbol keagamaan ini akan mudah dipahami dalam pengaplikasiannya yang realistik. Geertz melihat sistem simbol keagamaan dapat dielaborasi atau diinterpretasikan melalui beragam cara. Kebanyakan agama memaknai simbol-simbol keagamaan tersebut melalui ritual dan upacara. Dengan cara ini, dunia sebagaimana yang dibayangkan (*as imagined*) dan dunia sebagaimana yang dialami (*as lived*) dipadukan melalui perbuatan-perbuatan dalam bentuk simbol. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa simbol-simbol tersebut memiliki makna yang variatif dan spekulatif serta merujuk pada suatu tanda yang disepakati dan secara konvensional dibentuk bersama-sama oleh masyarakat atau budaya yang sedang hidup di dalamnya. Sebagai produk

³ . Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta, UI Press, 1987, hlm. 57-78

⁴ . Ralph Linton, *The Study of Man (Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia)*, Bandung, Jemmars, 1984, hlm. 102

sosial, simbol tidak hanya bermakna secara kolektif, tetapi bisa lebih bermakna dan meresap secara pribadi. Simbol merupakan perwujudan dari berbagai pemikiran atau gagasan, sikap, keputusan, kerinduan, maupun keyakinan.⁵

Dengan berpijak pada landasan teoritis di atas, dimana budaya, agama, dan bahasa (*symbol*) merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan membentuk suatu "simpulan" yang penuh dengan makna. Fenomena simpulan ini bisa dengan mudah kita temukan pada sosial-masyarakat di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat yang terdapat di Pulau Lombok.

Pulau ini berada di antara beberapa pulau, yaitu pulau Bali, Jawa, dan Sumbawa. Masyarakat asli yang mendiami pulau ini dikenal dengan suku Sasak. Salah satu fenomena budaya-agama yang sarat dengan makna religius serta sangat populer yang terdapat pada masyarakat ini adalah Waktu Tlu. Untuk itulah peneliti ingin mengangkat fakta tersebut dalam bentuk kajian, dengan tema penelitian: Budaya dan Agama (Analisis Semiologi Terhadap *Waktu Tlu* di desa Pengadangan kecamatan Pringgasele kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)

Banyak asumsi yang berkembang seputar *Waktu Tlu*. Di antara asumsi-asumsi tersebut, yaitu:

1. Sebuah kepercayaan kepada makhluk halus yang bersemayam pada benda mati atau benda tertentu yang memiliki kekuatan tetapi tunduk di hadapan kekuatan Tuhan;
2. Ia merupakan deskripsi tentang tiga prinsip dasar yang ada dalam kehidupan, seperti masa lalu, sekarang, dan masa depan;
3. Pembagian yang terkait dengan wilayah geografik, yaitu: ada gunung, daratan, dan pantai;
4. Pembagian yang terkait dengan kehidupan manusia, yaitu: lahir, berkembang, lalu meninggal;
5. Sementara yang terkait dengan pelaksanaan ibadah formal, ia adalah sholat yang dilakukan 3 waktu dan puasa dikerjakan hanya pada awal, tengah dan akhir bulan saja;

⁵. Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 37-39

6. Ia merupakan bentuk kepercayaan yang dipengaruhi oleh Animisme, Dinamisme, dan Hinduisme;
7. Dalam lingkup politik, ia merupakan gambaran tiga struktur dalam masyarakat yang selalu terkait, yaitu: Adat, Agama, dan Pemerintah;
8. *Waktu Tlu* adalah akulturasi ajaran Islam dan sisa kepercayaan yang lama yakni Animisme, Dinamisme, dan sebagian kepercayaan Hinduisme;
9. Hidup terdiri dari tiga unsur yaitu Air, Angin dan Tanah. Ketiga unsur ini juga menjadi dasar utama semua mahluk hidup yang ada dimuka bumi sehingga dapat tumbuh, hidup serta berkembang biak dengan baik.⁶

Beberapa asumsi dan pemahaman di atas berbeda dengan pemahaman yang penulis temukan (*anti thesis*) melalui wawancara dengan beberapa tokoh yang ada di desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.⁷

Kalau dihubungkan dengan sholat, menurut mereka, *Waktu Tlu* itu adalah subjek, sedangkan *Waktu Lima* adalah objek. Sebagai subjek, ia adalah yang bekerja, sementara *Waktu Lima* adalah sebagai objek yang dikerjakan.

Istilah *Waktu Tlu* bukan merujuk pada waktu sembahyang atau sholat, tetapi sebuah paham yang bersumber dari Ilmu Tasawuf yang bermula dari “kedalaman diri” manusia (*insight*) dan terekspresikan dalam bentuk *qolbi*, *qouli*, dan *fi’li* (ate-angen, onklat pemuni, engku cara/ hati-perasaan, ucapan, dan prilaku) kemudian menjelma dalam bentuk budaya yang populer dengan istilah Waktu Tlu.

Ketika keperyacaan atau keyakinan terbungkus dalam budaya, maka seringkali masyarakat terjebak pada lapisan luar, bahasa atau simbolnya tanpa menggali lebih jauh makna substansial yang tersimpan di baliknya. Padahal, menurut Roland Barthes tanda (*semiologi*) tidak terbatas pada linguistiknya tetapi mencakup semua sistem tanda, apapun substansi dan batas-batasnya; kesan (*image*), gerak-gerik, isyarat, sikap (*gesture*), suara-suara musik, objek, dan asosiasi kompleks dari semua ini yang membentuk isi (*content*), ritual, konvensi,

⁶ . Erni Budiwanti, *Islam Sasak, Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta, LkiS, 2000, hlm. 131-151

⁷ . Wawancara Pertama dilakukan pada 25 November tahun 2015

atau publik entertainment. Konstitusi ini kalau bukan bahasa paling tidak sistem-sistem signifikansi. Sistem-sistem ini tentunya mengacu pada suatu konsep yang idealistik.

Lebih lanjut, Barthes mengatakan bahwa semiologi tidak hanya berkecimpung dalam bahasa manusia seperti yang telah dikatakan oleh Saussure. Dalam kehidupan sosial saat ini kata Barthes ditemukan sistem yang sangat luas tentang tanda di luar bahasa. Menurutnya setiap sistem semiologi memiliki campuran linguistiknya. Jadi, sebenarnya antara sistem tanda (obyek semiologi) dan bahasa merupakan interdependent/interrelation yang tidak bisa berdiam sendiri.⁸ Maka, dari sudut pandang semiologi, Waktu Tlu, bukan semata-mata kumpulan simbol dalam bentuk tradisi (dalam bentuk pesta (*begawe*) atau yang lainnya), tetapi mengacu pada makna lain yang lebih substansial.

Pada sisi yang lain, adanya tekanan politik pada masa dahulu, yaitu penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Bali/masa Bali, berdampak pada ketidakbebasan umat Islam di Lombok, khususnya di daerah tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengerjakan syari`at secara umum, terutama dalam mengerjakan sholat. Fenomena-fenomena adanya pembakaran masjid yang dilakukan oleh prajurit-prajurit kerajaan Bali menyebabkan umat Islam di Lombok secara umum menunaikan sholat secara diam-diam dan sangat tergantung pada kondisi keamanan. Kondisi seperti ini, juga berdampak pada penunaian sholat secara sembunyi-sembunyi dan terkadang pada saat-saat tertentu hanya menampakkan pengerjaan tiga sholat saja, yaitu ashar, isya, dan subuh. Kondisi ini, seakan-akan menampakkan sebagian syari`at dan menyembunyikan sebagian yang lainnya (penunaian sholat secara tidak sempurna/hanya tiga kali/waktu tlu). Terkadang juga mengerjakan sholat lima kali, yaitu: Ashar di sore Kamis, Magrib pada malam Jum`at, Isya` pada malam Jum,at, Subuh pada hari Jum`at, dan Zduhur pada hari Jum`at. Pada minggu berikutnya juga sama, mengerjakan lima kali sholat, tetapi tidak setiap hari. Kondisi ini terjadi karena mereka (masyarakat *Waktu Tlu* saat itu) berada di bawah tekanan kekuasaan politik Belanda dan kerajaan Bali.

⁸ . Roland Barthes, *Elements of Semiologi*, New York, Hill and Wang, 1967, hlm. 9-10

Pola beribadah seperti ini berlanjut meskipun pendudukan kerajaan Bali dan penjajahan Belanda serta Jepang sudah berakhir.

B. Rumusan Masalah

Beberapa persoalan yang akan menjadi pusat bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana makna sejarah Suku Sasak dan desa Pengadangan?
2. Bagaimana pola-pola budaya-agama Waktu Tlu, khususnya di desa Pengadangan?
3. Bagaimana makna-makna filosofis *Waktu Tlu* menurut masyarakat Desa Pengadangan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bermaksud untuk menemukan makna yang dikandung dalam *Waktu Tlu* dengan terfokus pada penyingkapan:

- a. Sejarah masa lalu masyarakat Suku Sasak yang mendiami pulau Lombok, terutama ketika penaklukan dan penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Bali dan kolonial Belanda yang memiliki keterkaitan dengan sejarah munculnya Waktu Tlu;
- b. Mendokumentasikan budaya-budaya yang disebut sebagai *Waktu Tlu* yang terdapat di desa Pengadangan; dan
- c. Mencari serta Memberikan makna (interpretasi) atas simbol-simbol yang terdapat pada budaya *Waktu Tlu* tersebut.

2. Kegunaan atau manfaat Penelitian

Harapan penulis dari penelitian ini:

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Sasak terkait dengan sejarah pulau Lombok, sejarah masyarakatnya, dan sejarah serta makna budaya-agama Waktu Tlunya;
- b. Masyarakat Lombok mengerti, memahami, dan memegang nilai-nilai positif yang terdapat dalam ajaran budaya-agama Waktu Tlu; dan

- c. Memberikan manfaat bagi dunia akademik dalam bentuk literatur mengenai budaya dan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *Waktu Tlu* sebagai objek material bukanlah sesuatu yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Erni Budiwanti tahun 1997 dengan judul: *En Ethnographic Study of The Impact of the Islamisation on the Wetu Telu of Lombok*. Peneliti ini sudah diterbitkan (*Wetu Telu Versus Waktu Lima*);
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahsun pada tahun 1979 dengan judul: *Deskripsi Tentang Islam Wetu Telu di Pulau Lombok*, IAIN Sunan Ampel Mataram;
3. Penelitian yang dilakukan oleh Seven Cederroth pada tahun 1977 dengan judul: *The Use of Sacred Cloths in the Wetu Telu Culture of Lombok*;
4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Muhaimin Ali pada tahun 1999 dengan judul: *Praktek Keberagamaan Masyarakat Islam Waktu Telu di Lombok Nusa Tenggara Barat*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Ahmad Abdu Syakur pada tahun 2003 dengan judul: *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Tentang Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak)*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada saat itu, peneliti sempat berdialog dengan beliau. Penulis berkesimpulan dari hasil perbincangan dengannya, bahwa *Waktu Tlu* banyak menyimpang dari syari`at Islam dan *Waktu Tlu* adalah pensimplifikasi dari Islam;
6. Penelitian dalam bentuk Thesis yang dilakukan oleh saudara Zakaria Ansori dalam perspektif filsafat sosial pada tahun 2005 dengan judul: *Islam Wetu Telu Dalam Pembentukan Masyarakat Sasak*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua penelitian di atas, lebih menekankan pada kajian Etnografi, Sosiologi, dan Filsafat Sosial.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang Budaya dan Agama (Analisis Semiologi Tentang *Waktu Tlu* di desa Pengadangan kecamatan Pringgasele kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat), dalam perspektif semiologi masih orisinal, artinya berbeda dari yang lain, karena objek formal penelitian ini adalah bahasa, khususnya semiologi Roland Barthes, terutama yang terkait dengan tanda-tanda dalam budaya-agama, yang jelas tidak sama dari para peneliti sebelumnya yang menggunakan pendekatan formal yang berbeda serta lokasi yang juga berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis berasumsi bahwa *Waktu Tlu* tidak bisa dianggap hanya sebatas budaya, tetapi ia sangat terkait dengan agama, dan juga kekuasaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sebelum membahas mengenai tanda-tanda dalam budaya Waktu Tlu, penulis akan mendeskripsikan teori-teori seputar hubungan agama dan politik serta konflik dan kekuasaan yang memiliki dampak terhadap objek pembahasan ini.

1. Islam dan Politik

Ada tiga pendapat yang berkembang dalam lingkungan kaum muslim tentang politik. *Pertama*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk bernegara. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur`an tidak mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. *Ketiga*, pendapat yang mengambil jalan tengah bahwa dalam Alquran tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Mengenai masalah hubungan antara Islam dan Negara, dalam pandangan seorang intelektual muslim Indonesia seperti Kuntowijoyo,⁹ dianggap sebagai instrumen yang berbeda. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*Bashiron wa Nadziron*) sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*Corection*). Instrumen-instrumen itu mempunyai tingkat fungsional yang berbeda. Yang satu mempengaruhi sosial mengenai kesadaran bersama (*Colective Consciousnes*)

⁹ . Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, Hal 191 — 192.

sedangkan instrumen yang lain mempengaruhi dengan keputusan dan kekuasaan perang.

Gambaran yang menyerupai pemaparan di atas, sepanjang sejarah manusia menurut Munawir Sadjali,¹⁰ wacana tentang hubungan Islam dan negara secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 Aliran. *Pertama*, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam tidaklah berpengertian seperti dipahami Barat yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, Islam lebih luas dari pada itu, Islam merupakan ajaran yang lengkap dan menyeluruh, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk politik dan masalah kenegaraan didalamnya. Menurut mereka teks-teks suci telah memberikan kepastian normatif kepada setiap muslim untuk menegakan agama Islam dimuka bumi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Syeikh Hasan Al - Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridho, Khomaini dan Al - Maududi.

Aliran *kedua*, aliran yang berpendirian bahwa tidak ada bedanya dengan agama yang lain seperti Kristen. Aliran ini memahami Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengurus masalah hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang nabi. Seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya mempunyai tugas kenabian yaitu menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi Muhammad tidak di utus untuk menjadi kepala pemerintahan. Aliran ini dimotori oleh Ali Abdul Raziq, Thoha Muhammad Husain, termasuk juga pemimpin Turki, Kemal Ataturk.

Aliran *ketiga*, aliran yang menolak adanya konsep dan ketatanegaraan dalam Islam. Tetapi juga menolak pandangan Barat yang terbatas pada ketuhanan. Tetapi Islam mengajarkan tata nilai etik bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang paling menonjol adalah Muhammad Husain Haikal.

Di Indonesia secara khusus, teori hubungan Islam dan negara atau Islam politik tidaklah satu, tetapi sangat beragam dan kontekstual. Beberapa teori

¹⁰ . Munawar Sadjali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1993. hal. 1-2.

tersebut telah dikemukakan oleh Bahtiar Effendy, yaitu; dekonfessionalisasi, domestikasi, skismatik dan aliran, trikotomi, dan kultural.¹¹

Dekonfessionalisasi dikembangkan oleh C.A.O Van Nieuwenhuijze seorang ahli Indonesia asal Belanda. Teori ini dipinjam dari kecenderungan akomodasionis kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik Belanda, dimana menurut Van, terdapat kesulitan yang sangat besar ketika melihat kehidupan sosial-keagamaan di Belanda dimana kepentingan-kepentingan berbagai kelompok denominasi sulit dijembatani. Menurutnya, agar dapat menyelenggarakan suatu pertemuan tertentu, wakil-wakil dari berbagai kelompok peribadatan akan menyepakati sebuah landasan bersama yang juga dirumuskan bersama, yaitu persetujuan bahwa implikasi-implikasi tertentu dari sejumlah doktrin peribadatan mereka akan dihindari dari topik pembicaraan. Pendeknya, teori ini mengedepankan kepentingan bersama antar berbagai kelompok dengan menghindari hal-hal yang bersifat internal dan doktrinal dari masing-masing kelompok yang menjadi penghalang atau penghambat kepentingan bersama antar kelompok peribadatan. Menurut teori ini, mengedepankan kepentingan bersama tidak harus merubah hal yang paling mendasar pada masing-masing kelompok peribadatan, seperti keyakinan atau agama.

Domestifikasi Islam adalah teori yang kemudian sering diidentikkan dan disandarkan pada karya-karya seorang tokoh yaitu Harry J. Benda. Teori ini dibangun dari pendekatan historis Islam Indonesia pada abad 16 hingga abad ke-18, terutama pada periode perebutan kekuasaan antara para penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang taat di wilayah pesisir Jawa, yang diwakili oleh Demak, melawan kerajaan mataram yang terkenal sinkretis di wilayah pedalaman. Ketika kerajaan Mataram memeluk Islam, ia berusaha menekan wilayah-wilayah taklukan mereka di pesisir yang memberontak, dalam proses ini menghancurkan bagian-bagian paling penting dan dinamis dari masyarakat Islam di pulau Jawa. Dalam proses penaklukan kerajaan-kerajaan ortodok di pesisir ini kerajaan Mataram yang sinkretis menang besar dan pada periode-periode ini terjadilah

¹¹ . Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara, Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1998, hlm. 21-47

domestifikasi Islam, ditambah lagi dengan dibangunnya kerjasama atau aliansi antara kelompok aristokrat Jawa dan kekuatan-kekuatan kolonial Belanda yang mengakibatkan proses domestifikasi berkembang dalam tingkatnya yang paling kuat dan luas mengakibatkan kemandulan kekuatan cengkraman politik Islam Jawa. Domestifikasi ini kemudian berkembang terus pascakolonialis di Indonesia.

Teori skismatik dan aliran disandarkan pada dua tokoh yaitu Robert R. Jay dan Clifford Geertz. Jay lebih menekankan pada corak skismatik hubungan Islam dan Jawa-isme yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki bidang politik, kebudayaan, dan kehidupan sosial. Sementara Geertz, mengembangkan skisme sosial-keagamaan ke dalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik. Keduanya melihat Indonesia dari mikrokosmos Mojokuto di Jawa Timur pada suatu periode dimana konflik antar partai amat menonjol.

Teori trikotomi digagas dan dikembangkan oleh Allan Samson. Ia merupakan model pengkotakan masyarakat Islam dalam tiga bagian yaitu; masyarakat Islam fundamentalis yang mendorong adanya negara atau politik Islam. Kedua, masyarakat Islam reformis atau modernis yang identik dengan kaum santri yang tidak terjebak pada bentuk Islam politik, tapi menginginkan terimplementasinya nilai-nilai Islam yang substantif. Ketiga, masyarakat Islam akomodis. Kelompok ketiga ini sering disebut juga sebagai Islam abangan yang lebih akomodatif terhadap berbagai kepentingan, terutama yang terkait dengan keberpihakan untuk bangsa.

Islam kultural adalah synthetis dari Islam politik dan Islam non politik (yang tidak terlibat dalam politik yang dianggap tidak sempurna karena tidak ikut dalam kekuasaan atau negara). Model ini dikemukakan oleh Donald K. Emmerson yaitu Islam spiritualis yang tidak terjebak pada bentuk formalitas yaitu politik Islam atau negara Islam. Ia juga sering disebut sebagai Islam yang lebih menjunjung atau mengedepankan nilai-nilai moralitas dan sebagai counter terhadap Islam politik. Slogan “Islam yes, politik Islam no” yang pernah dilontarkan oleh Nurkholis Majid merupakan bentuk Islam kultural yang mengajak masyarakat Islam Indonesia untuk tidak terjebak pada bentuk formalitas Islam politik yang

sering mengkotak-kotakkan ummat Islam yang tidak jarang berujung pada konflik, baik pada tingkat grass road maupun pada tingkat elite politik.

Dalam kasus *Waktu Tlu* (Islam Waktu Tlu) di Lombok secara umum, khususnya di desa Pengadangan sangat berbeda dengan teori-teori seperti yang digambarkan di atas. Kasus *Waktu Tlu* sangat berkaitan dengan penjajahan yang menimbulkan konflik dan berujung pada penekanan pihak yang lemah (masyarakat Islam Sasak) oleh penjajah yaitu, kerajaan Bali dan kolonialisme Belanda.

2. Konflik dan Kekuasaan

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.¹²

Ketika terjadi konflik, kedua belah pihak biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang muncul dari konflik ini secara umum memiliki tiga pola, yaitu; kalah-menang, kalah-kalah, dan menang-menang. Pola yang pertama menggambarkan satu pihak ada yang menang sementara pihak yang lain kalah atau kompromi yakni membagi perbedaan- yang ada. Type yang kedua, bila kedua belah pihak tidak ada yang mampu memaksakan sebuah hasil atau bersedia untuk kompromi, pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing-masing pihak dimana hasilnya masing-masing berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada mereka memakai strategi yang lain. Sementara type yang ketiga adalah kedua belah pihak berkompromi untuk menyelesaikan persoalan bersama demi keuntungan bersama. Langkah ini biasa ditempuh oleh kedua belah pihak

¹² . Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 7-8

yang bertikai agar tidak terjadi penyesalan bila mereka mengambil langkah kedua.¹³

Konflik yang pertama biasa disebut dengan asimetris yaitu konflik yang tidak sesimbang. Konflik ini biasa terjadi antara mayoritas dengan minoritas dalam berbagai rupa dan tempat. Sementara yang kedua biasa disebut dengan simetris, dimana kedua belah pihak relatif memiliki kepentingan yang sama. Akan tetapi, baik yang pertama maupun yang kedua, konflik seperti apapun bentuknya tetap akan memunculkan “korban” pada kedua belah pihak. Menindas harus bersifat menindas, meskipun tidak seperti itu ketika berada dalam posisi yang ditindas. Ada banyak resiko bagi yang menindas ketika mereka ingin mempertahankan kekuasaan mereka yaitu bagaimana menjaga pihak yang lemah untuk selalu berada di bawah dan dalam kekuasaannya.¹⁴

Kekuasaan adalah nilai (*value*) atau kebalikannya, nilai itu adalah kekuasaan menjadi perdebatan. Dalam ilmu pengetahuan, kekuasaan memiliki fungsi untuk menaklukkan alam (seperti yang dikemukakan oleh F. Bacon). Dalam konflik, kekuasaan menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar, karena kekuasaan adalah kesempatan dan kemajuan bagi yang lebih kuat (seperti yang dikemukakan oleh Cumpłowicz). Dalam demokrasi, kekuasaan merupakan alat atau instrument untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat mayoritas (Bentham), bahkan dalam kekuasaan itu sendiri merupakan instrumen bagi transenden diri (Nietzsche). Seperti apa pola kekuasaan, bagaimana mendapatkan kekuasaan, dan kemana tujuan kekuasaan merupakan tiga sisi yang menggambarkan keinginan pelakunya, baik itu individu, negara, ataupun masyarakat.¹⁵ Tiga sisi kekuasaan ini secara umum melahirkan konflik, sang penguasa, dan yang dikuasai dalam beragam bentuk.

¹³ . Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 9-10

¹⁴ . Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 18-19

¹⁵ . Milton D. Hunnex, *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosphers*, Chandler Publishing Company, 1986, hlm. 86

Tiga pola konflik di atas melahirkan tiga pola/wajah kekuasaan, yaitu; kekuasaan yang mengancam, kekuasaan yang dapat dipertukarkan, dan kekuasaan yang dapat diintegrasikan. Kekuasaan yang pertama memiliki makna untuk memerintah, menertibkan, dan melaksanakan (“lakukan apa yang kuinginkan atau aku akan melakukan apa yang tidak engkau inginkan”). Kekuasaan ini memaksa atau kekuasaan yang keras. Wajah yang kedua adalah kekuasaan untuk melahirkan kerja sama, tawar menawar atau kompromi untuk melegitimasi, untuk memberi inspirasi-kekuasaan yang persuasif atau kekuasaan yang lunak. Sedangkan yang ketiga merupakan kepanjangan dari model kedua, yang diasosiasikan dengan persuasi dan pemecahan masalah jangka panjang yang bersifat transformatif (“secara bersama kami dapat melakukan sesuatu yang lebih baik bagi kita berdua”).¹⁶

Pola kekuasaan dalam pandangan Foucault, tidak hanya berbicara mengenai relasi yang menguasai dan yang dikuasai atau subjek dan objek, apakah kita harus berada di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, atautah kita terjebak di antara keduanya, karena orang yang terjebak di luar kekuasaanpun bukan berarti dia dipaksa untuk kalah setiap saat bagaimanapun keadaannya.¹⁷ Meskipun orang atau institusi apapun, ketika ia berada di luar penguasa dan kekuasaan bukan berarti ia kalah atau mengatakan dirinya kalah, karena ia bisa menjadi sesuatu yang berbeda dalam keadaan dan bentuk apapun.

Menurutnya, berbicara mengenai kekuasaan memiliki cakupan yang sangat luas dan meninggalkan pola relasi sebelumnya. Ia mengemukakan beberapa point tentang kekuasaan: 1. Kekuasaan sama luasnya dengan dengan lembaga sosial; tidak ada ruang yang sama sekali bebas di celah-celah jaringannya; 2. Relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis-jenis relasi lain (produksi, kekerabatan, keluarga, dan seksualitas) dimana mereka memainkan sekaligus peran pengkondisian dan yang terkondisikan; 3. Relasi ini tidak hanya

¹⁶ . Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 16-17

¹⁷ . Michel Foucault, *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 2002, hlm. 175

berbentuk larangan dan hukuman, melainkan bentuk-bentuk yang beragam; 4. Kesalinghubungan di antara mereka menggambarkan kondisi umum sebuah dominasi, dan dominasi ini diatur dalam bentuk strategi yang kurang lebih koheren dan tunggal; dimana kekuasaan yang prosedurnya menyebar, beragam, dan lokal diadaptasikan, dipersenjatai kembali, dan diubah oleh strategi-strategi global, semuanya ini disertai oleh sejumlah fenomena kelembagaan, pergeseran, dan resistansi. Pola ini menggambarkan multibentuk produksi relasi-relasi dominasi yang secara khusus integrasinya rentan terhadap strategi-strateginya; 5. Relasi-relasi kekuasaan benar-benar “melayani”, namun bukan berarti mereka benar-benar “melayani” kepentingan ekonomis sebagai sesuatu yang utama, melainkan karena mereka memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam strategi-strategi yang ada; 6. Tidak ada relasi kekuasaan tanpa halangan. Hal ini nyata dan efektif karena mereka dibentuk tepat pada titik dimana relasi-relasi kekuasaan dijalankan. Penghalang kekuasaan tidak harus berasal dari sesuatu yang nyata, atau sesuatu yang memang terhalang oleh kecintaan pada kekuasaan itu sendiri. Halangan itu hadir di mana-mana bersamaan dengan kekuasaan; oleh karenanya seperti kekuasaan, halangan bentuknya bermacam-macam dan dapat diintegrasikan dalam strategi-strategi global.¹⁸

Istilah dominasi yang dikemukakan oleh Foucault yang menggambarkan strategi-strategi, ragam, dan luasnya cakupan kekuasaan, memiliki kemiripan dengan kekuasaan dengan istilah hegemoni seperti yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Teori hegemoni Antonio Gramsci menganalisa berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat. Lewat perspektif hegemoni, akan terlihat bahwa penulisan, kajian suatu masyarakat, dan media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan kelompok penguasa.¹⁹

Kondisi politik yang ada di pulau Lombok, baik pada masa pendudukan Bali (kerajaan Bali) kemudian disusul oleh Belanda dan persatuan keduanya

¹⁸ . Michel Foucault, *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 2002, hlm. 175-176

¹⁹ . Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramski*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 19-22

dalam penguasaan atas masyarakat Sasak mengakibatkan kondisi umat Islam Sasak dalam keadaan tertekan, tertindas, dan teraniaya. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh umat Islam untuk terlepas dari kekuasaan dan penjajahan menimbulkan berbagai macam konflik yang tentunya tidak seimbang, karena para penjajah dalam hal ini Bali yang dibantu oleh Belanda memiliki persenjataan yang lebih canggih.

Hegemoni kekuasaan penjajah atas Lombok, khususnya masyarakat Pengadangan berdampak pada ketakutan, tidak adanya kebebasan, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan syariat agama Islam secara penuh dan sempurna. Keadaan ini, menyebabkan masyarakat Islam Pengadangan menunaikan ajaran agama secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh penjajah. Karena lamanya masa penjajahan yang dialami oleh masyarakat Pengadangan menyebabkan mereka berpegang pada dimensi agama yang tidak tergantung dan dibatasi oleh tempat dan keadaan, yaitu sisi spiritualitas atau bathin saja. Sisi ini yang kemudian mereka maknai sebagai “hanya ingat” kepada Allah sudah cukup menandakan kepada seseorang bahwa ia adalah seorang muslim.

Menjalankan agama secara kebathinan dalam rangka menyelamatkan diri dari tekanan dan siksaan kaum penjajah juga menyebabkan masyarakat Pengadangan beralih kepada praktik-praktik budaya, dimana praktik-praktik budaya ini relatif lebih aman dan minim gangguan dan tekanan dari kaum penjajah.

Kebiasaan yang sudah mendarah daging dan turun-temurun dalam menjalankan tradisi, baik yang bersifat budaya kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan tradisi keagamaan, termasuk tidak menjalankan syari'at secara utuh terus dijalankan oleh sebagian masyarakat Pengadangan, meskipun penjajahan telah berakhir dan Indonesia dinyatakan telah merdeka. Masa ini sangat populer di kalangan masyarakat Pengadangan dengan sebutan Zaman Bali.²⁰ Kondisi ini kemudian identik dengan Waktu Tlu, dimana tradisi budayanya dipenuhi oleh ritual-ritual dan simbol-simbol yang sangat sarat akan makna.

²⁰ . Wawancara dengan pak Khidir, tanggal 21/11/2015. hlm. 2

3. Strukturalisme dan Semiologi

Kata struktur memiliki beberapa makna, yaitu; 1. Cara sesuatu disusun atau dibangun; 2. Susunan atau bangunan yang disusun dengan pola tertentu; 3. Pengaturan unsur atau bagian suatu benda; 4. Ketentuan unsur-unsur dari suatu benda; 5. Pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis.²¹ Menurut Benny H. Hoed, struktur adalah bangun (teoritis) yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan. Struktur mempunyai sifat totalitas dan transformatif²². Kata struktur adalah kata yang *polymeaning* yaitu makna kata tergantung pada penempatan dan konteksnya.

Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, Strukturalisme merupakan counter terhadap keakuan atau kesombongan aliran filsafat, yaitu eksistensialisme. Eksistensialismelah yang lebih mendasarkan diri pada dominasi individu dalam kehidupan. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, timbul aliran fenomenologi yang memiliki landasan pada keharusan subyek untuk tidak menyepelkan obyek.

Berbeda dengan kedua aliran di atas, stukturalisme lebih mendasarkan diri pada sistem-sistem konvensional yang membangun pola dasar setiap individu dan masyarakat. Dampak aliran ini adalah subyek tidak lagi dilihat sebagai sosok yang paling kuasa. Namun sebaliknya, subyek merupakan produk kontrak sosial yang harus mengikuti pola-pola yang sudah disepakati manusia, “kematian” manusia disini, dimaksudkan, bahwasanya manusia tidak lagi bisa dianggap sebagai suatu realitas ‘suigeneris’ dan khas, yang lebih tinggi, unik dan absolut terhadap alam semesta, jauh dari pada memberi arti (signifikasi) kepada realitas ekstern, sebaliknya realitas itu sendirilah yang secara total menentukan kondisi manusia. Determinisme material dari struktur-struktur menentukan manusia secara lengkap, sehingga subyektivitas dan kesadarannya dilarutkan ke dalam dunia benda-benda.²³

²¹ . <http://kbbi.web.id/struktur> 04/05/16 23:45

²² . <https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur> 04/05/16 23:50

²³ . L. Leahy, *Strukturalisme dan “Kematian Manusia”*, dalam Majalah Orientasi, Jakarta, 1983, hlm. 8.

Strukturalisme dalam perkembangannya diawali dengan pendasaran diri pada sistem kebahasaan. Bahasa adalah salah satu contoh bangunan terstruktur, dimana masing-masing bagian saling terkait. Sistem-sistem kebahasaan ini kemudian disebut dengan tanda. Tanda inilah yang harus dipakai oleh setiap orang dalam lingkup kebahasaan. Struktur tanda-tanda inilah kemudian yang diterapkan oleh para ahli strukturalis dalam menganalisis fenomena kehidupan sehari-hari sebagai bagian yang harus dipahami dan dipraktikkan sebagai kontrak sosial yang konvensional. Sementara tanda dalam rujukan kaum strukturalis adalah tanda yang memiliki makna.

Begitu juga dengan semiologi Barthes, sangat terkait dengan strukturalisme. Barthes membatasi strukturalisme sebagai sebuah cara menganalisa artefak-artefak budaya yang berasal dari metode linguistik. Dari linguistik, strukturalisme ini mengambil dua prinsip utamanya, yakni bahwa entitas penandaan tidak memiliki esensi, tetapi dibatasi oleh jaringan relasi-relasi, baik internal maupun eksternal. Prinsip lain yang diambil adalah bahwa untuk menilai fenomena penandaan dilakukan dengan melukiskan sistem norma-norma yang membuat mereka mungkin.²⁴

Penjelasan secara struktural ini mendiskusikan struktur dan signifikansi dari obyek-obyek atau tindakan-tindakan partikular dengan menghubungkan objek-objek itu dengan sistem tempat obyek-obyek itu berfungsi. Keterkaitan antara obyek yang membangun jaringan relasi pada sebuah sistem kemudian menjadi pokok bahasan utama strukturalisme. Memetakan norma-norma atau aturan-aturan yang bekerja di dalamnya adalah tugas strukturalisme.²⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara banyak sekali didapatkan tanda-tanda (semiotik) yang tentunya mengandung makna, misalnya: stopan lampu (lalu-lintas), pemberian bunga seorang pria kepada wanita, rona wajah seseorang, warna pakaian seorang pentakziah dan lain-lain. Bahkan dalam dunia hewan liar pun terdapat banyak tanda-tanda yang bermakna, misalnya,

²⁴ . Kurniawan, *Semiologi Roland Barthes*, Magelang, Indonesiatara, 2001, hlm. 87.

²⁵ . Kurniawan, *Semiologi Roland Barthes*, Magelang, Indonesiatara, 2001, hlm. 83

gonggongan anjing pada malam hari. Pada hakekatnya tanda meliputi semua lingkup kehidupan dan kebiasaan manusia.

Kata semiotik berasal dari kata Yunani semeiotika (semiotika) yang berasal dari kata benda semeion, artinya isyarat, tanda, gejala dan jejak. Jadi semiotik itu berarti ilmu isyarat dan tanda. Pada zaman Aristoteles ditemukan suatu teori umum tentang tanda-tanda. Dengan pengaruh Aristoteles yang besar, teori tersebut tersebar di dunia Barat dan Timur Tengah, seperti teori semiotik tradisi, yaitu semua yang diindera itu ada bayangannya dalam jiwa manusia, yaitu dalam bentuk konsep-konsep. Oleh karena itu, menurut teori tradisi ini, setiap masyarakat bahasa mempunyai sistem tandanya sendiri, yang terdiri dari sistem bunyi dan sistem aturan tata bahasa untuk menggambarkan konsep-konsep universal, termasuk juga pola hubungannya.²⁶

Pada tahun 1690, John Locke untuk pertama kalinya istilah Yunani semeiotika tersebut dijumpai. Filsafat Inggris ini membagi lapangan pengetahuan manusia menjadi tiga bagian yang besar yaitu: phisike (pengetahuan hakekat dari benda-benda (ilmu alam, kosmologi, ontologi), praktike (penggunaan yang tepat dari pengetahuan itu dalam perbuatan manusia (teknik dan etika), semeiotika (pemakaian tanda dengan efektif (semiotik)).²⁷

Locke melukiskan semeiotika sebagai teori umum tentang tanda-tanda (doctrine of sign), yaitu logika proses-proses tanda yang kognitif yang menyebabkan ilmu dapat dikomunikasikan. Kata-kata dianggapnya sebagai tanda bahasa yang dapat ditempelkan pada ide-ide (atau cita), yaitu gambar konsep benda-benda, ide-ide dan kata-kata adalah matarantai utama dalam proses-proses tanda yang kognitif atau proses-proses tanda yang berhubungan dengan pengetahuan.

Kalau dalam bahas Yunani disebut semeion, maka dalam bahasa Inggris disebut symbolic yaitu tanda/isyarat. Pembagian yang dilakukan oleh John Locke adalah dalam lingkup teoritik. Pada dataran praktisinya symbol atau tanda ini

²⁶ . Doeda Nauta, *Gambar Semiotik (teori umum tentang benda-benda)*, Yogyakarta, dalam Majalah Mawas Diri edisi Oktober, 1989, hlm. 7

²⁷ . Doeda Nauta, *Gambar Semiotik (teori umum tentang benda-benda)*, Yogyakarta, dalam Majalah Mawas Diri edisi Oktober, 1989, hlm. 7-8

tidak hanya melekat dalam ilmu-ilmu pasti seperti matematika, logika dan ilmu pengetahuan, pembicaraan mengenai hubungan antara bentuk dan isi (form and content) tidak hanya berkisar pada wilayah-wilayah ilmu tersebut. Tetapi masyarakat yang konsen terhadap bentuk sebagai sebuah ekspresi dari pemahaman manusia, juga menganalisis mitos, analogis, bentuk pikiran metaporis dan seni merupakan bentuk aktivitas intelektual yang juga ditentukan oleh model simbol (symbolic modes), dimana semuanya tidak terlepas dari makna.²⁸

Pada perkembangan selanjutnya, muncullah kaum pragmatis yang dipelopori oleh Charles Sanders Peirce, George Mead, William James dan John Dewey. Merekalah yang mengganti hubungan bayangan yang statis antara kata (tanda bahasa), ide (konsep) dan benda (hal yang bertanda) itu dengan suatu hubungan pragmatik (pragmatik=perbuatan) yang lebih dinamis yaitu bayangan diganti dengan aturan permainan dan aturan pemakaian. Dalam hal ini Peirce adalah bapak pragmatisme dan bapak semiotik modern.²⁹

Kalau di Amerika dipelopori oleh Peirce, maka di Perancis muncul tokoh aliran linguistik yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure yang kemudian dikenal sebagai bapak linguistik modern dan peletak dasar strukturalisme. Hal ini disebabkan oleh karena yang datang sesudahnya banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem linguistik yang dibangunnya dan dipraktikkan dalam berbagai sistem disiplin ilmu seperti Claude Levi Strauss, Roman Jakobson, dan Roland Barthes. Roland Barthes adalah salah seorang sarjana yang secara konservatif menjabarkan teori Saussure. Ia menerapkan model Saussure dalam penelitiannya tentang karya-karya sastra dan gejala-gejala kebudayaan, seperti mode pakaian.

Bagi Barthes komponen-komponen tanda, yakni penanda (Saussure: signifiant) dan petanda (Saussure: signifie), terdapat juga pada tanda-tanda bukan bahasa; antara lain terdapat pada mite, yakni keseluruhan sistem citra dan kepercayaan yang dibentuk masyarakat untuk mempertahankan dan menonjolkan identitasnya. Menurut Barthes, hubungan antara mite dengan bahasa terdapat pula

²⁸ . Susanne K. Langer, *Philosophy In A New Key, A Study In The Symbolism of Reason, Tine, and Art*, New York, New American Library, 1949, dalam Preface.

²⁹ . Doeda Nauta, *Gambar Semiotik (teori umum tentang benda-benda)*, Yogyakarta, dalam *Majalah Mawas Diri* edisi Oktober, 1989, hlm. 8.

dalam hubungan antara penggunaan bahasa literer dan estetis dengan bahasa biasa. Dalam fungsi ini yang diutamakan adalah konotasi, yakni penggunaan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu yang lain dari pada apa yang diucapkan. Baginya lapisan pertama itu taraf denotasi, dan lapisan kedua taraf konotasi; penanda-penanda konotasi terjadi dari tanda-tanda sistem denotasi.³⁰

Barthes juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada mite itu sendiri sebagai sebuah obyek. Pertama-tama mite lebih dekat dengan apa yang disebutkan oleh sosiolog Durkheim sebagai sebuah ‘representasi kolektif, yang bisa dibaca dalam ungkapan-ungkapan yang tak bernama dari suatu tekanan, periklanan, barang-barang konsumsi massa: hal itu adalah suatu yang ditentukan secara sosial, sebuah ‘refleksi’.

Kemudian refleksi ini disesuaikan oleh image yang dipakai oleh Marx yaitu kebalikannya yang sebelumnya dianggap sebagai kultur menjadi hal yang natural atau paling tidak sosial, kultur, ideologi, sejarah menjadi hal yang natural atau alami. Sesuatu yang tak berarti, tetapi produk dari berbagai kelas dan menjadi moralnya, kultur dan konsekuen estetika dibangun (disusun) sebagai materi pelajaran atau sumber sehingga menjadi sesuatu yang common sense (pengertian umum), Right Reason (Nalar yang benar), norma, dan opini umum.

Mitologi kontemporer mengalami perubahan yakni tekanannya pada hal-hal yang normatif. Mitologi sebagai obyek hanya ada pada naratif, tetapi itupun hanya sebatas wacana yang menjadi wilayah semiologi; yang tentunya menjangkau wilayah-wilayah konotasi ataupun pertanda. Ideologi yang tentunya terjelma dalam sistem semantik, denotasi yang sifatnya natural yaitu bahasa millineal, maternal, skolastik dan sebagainya.³¹

Barthes juga mendefinisikan objek yaitu, “sesuatu yang dipakai untuk sesuatu”. Maka obyek adalah berada pada pandangan yaitu mengenai pemakaian yang biasa disebut fungsi. Dengan cara demikian, secara spontan dapat dirasakan bagian kesempurnaan objek, objek melayani manusia untuk berbuat di atas dunia,

³⁰ . Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik umum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1988, dalam *Pengantar*, Mongin-Ferdinan De Saussure (1857-1913) Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme, oleh Harimurti Kridalaksana, hlm. 27-28.

³¹ . Roland Barthes, *Image, Music, Text*, London, Fontana Press, 1977, hlm. 165-166.

untuk memodifikasi dunia, untuk berada di dunia dalam berbagai mode (cara) yang aktif; obyek adalah bagian dari mediator antara aksi dan manusia. Lebih lanjut Barthes mengatakan objek-objek ini memiliki hal prinsip yaitu sebuah fungsi, manfaat dan tujuan.³² Seperti yang sering dimisalkan dalam Hight Code (kode lalu lintas) dan Fashion.

Istilah semiologi dijadikan sebagai dasar struktural dalam kerangka analisis Barthes yang diambil dari sistem linguistik strukturalnya Saussure. Istilah ini memiliki kesamaan dengan semiotika yang diambil dari filsuf Amerika Peirce. Dalam pandangan strukturalis semiotika, bahwa sebuah bahasa dibangun oleh struktur atau sistem tanda, jika salah satu dari struktur tersebut tidak ada atau hilang, maka signifikasi dan kelancaran dalam komunikasi akan berkurang. Dalam bukunya *Elemen-elemen Semiotika* (yang disebutnya semiologi) Barthes menyebutkan bahwa semiotika mempelajari segala sistem tanda, apapun substansi dan batas-batasnya: gerak-gerak, bunyi-bunyi, musik, obyek-obyek, asosiasi-asosiasi kompleks antara semuanya itu. Namun dikatakan pula, bahwa sampai pada terbitnya buku itu, semiotika masih merupakan ilmu yang coba-coba, penyebabnya adalah ketidak mungkinan untuk menerapkan secara sepenuhnya setiap konsep Saussure mengenai semiotika. Saussure kata Barthes cenderung menempatkan bahasa hanya sebagai salah satu bagian dari semiotika. Padahal menurutnya, tanda-tanda yang lain tidak sepenuhnya otonom dari bahasa. “setiap sistem semiologis mempunyai campuran linguistiknya”. Karena itu, bagi sistem – sistem tanda yang lain, bahasa tidak hanya berposisi sebagai model, tetapi juga sebagai komponen, pemancar atau petanda dari sistem tanda yang lain itu.

Menurut Barthes, Saussure dengan karyanya *General Course in General Linguistik* yang terbit pertama kali tahun 1916 hanya terfokus masalah tanda dan semiologi linguistik. Maka menurut Barthes objek semiologi tidak terbatas pada linguistik tetapi mencakup semua sistem tanda apapun, apapun substansi dan batas-batasnya; kesan (*image*), gerak-gerak, isyarat, sikap (*gesture*), suara-suara musik, objek, dan asosiasi kompleks dari semua ini, yang membentuk isi ritual,

³² . Roland Barthes, *The Semiotic Challenge*, New York, Hill and Any, 1988, hlm. 181-182.

konvensi atau publik entertainment; konstitusi ini kalau bukan bahasa paling tidak sistem-sistem signifikansi.³³

Lebih lanjut Barthes mengatakan bahwa semiologi tidak hanya berkecimpung dalam bahasa manusia seperti yang telah dikatakan oleh Saussure. Dalam kehidupan sosial saat ini kata Barthes ditemukan sistem yang sangat luas tentang tanda di luar bahasa seperti code lalu lintas (*Hight Code*). Obyek, image dan bentuk tingkah laku bisa bertanda/menandakan dan juga berlaku pada skala yang lebih besar, tetapi tidak bisa otonom, karena setiap sistem semiologi memiliki campuran linguistiknya.³⁴ Jadi sebenarnya antara sistem tanda (obyek semiologi) dan bahasa merupakan interdependent atau interrelation yang tidak bisa berdiam sendiri.



³³ . Roland Barthes, *Elements of Semiology*, New York, Hill and Wang, 1967, hlm. 9

³⁴ . Roland Barthes, *Elements of Semiology*, New York, Hill and Wang, 1967, hlm. 9-10